

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

New Public Management adalah upaya pencarian dari para ahli administrasi negara terhadap pemecahan permasalahan yang dihadapi pemerintah di berbagai negara maju maupun negara yang sedang berkembang sebagai dampak dari berbagai krisis yang melanda negara-negara yang bersangkutan. Berdasar pada perkembangan tersebut, sebagai upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi, ahli administrasi negara banyak melakukan terobosan yang salah satunya adalah paradigma *New Public Management* (NPM) (Wardhani dan Riharjo, 2015). Paradigma NPM itu sendiri sesungguhnya telah beberapa kali mengalami perubahan cukup drastis. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana, namun merupakan perubahan yang telah mengubah peran pemerintah, terutama dalam hal hubungan antar pemerintah dan masyarakat sehingga menimbulkan dampak serius pada manajemen sektor publik yang menjadi lebih fleksibel (Mahmudi, 2003). Hal tersebut disebabkan oleh sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarki sehingga perlu adanya perubahan atau seringkali disebut dengan reformasi manajemen. Melalui paradigma NPM, diharapkan mampu menjadi media pelaksanaan reformasi manajemen khususnya pada manajemen pemerintahan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi manajemen pemerintahan, pemerintah memberi dukungan dengan dimunculkannya 3 (tiga) paket Undang-Undang Keuangan Negara antara lain: (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan (3) Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Dan Pengelolaan Keuangan Negara, serta beberapa peraturan pemerintah lainnya yang digunakan sebagai dasar petunjuk pelaksanaan anggaran. Melalui 3 (tiga) paket Undang-Undang tersebut, pemerintah mengamanahkan adanya reformasi di bidang manajemen dengan

diberlakukannya kebijakan penerapan anggaran berbasis kinerja. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan pemerintah mampu menjawab harapan publik terhadap anggaran pemerintah yang mestinya tersalurkan untuk kepentingan publik.

Anggaran berbasis kinerja adalah suatu metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan melalui kegiatan-kegiatan dalam hal menghasilkan manfaat yang akan dicapai (Achdiat, 2010). Anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*) juga dapat diartikan suatu sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan erat kaitannya dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi (Bastian, I., 2006). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga menjelaskan bahwa anggaran berbasis kinerja disusun berdasarkan pendekatan prestasi kinerja yang akan dicapai dan penerapan anggaran berbasis kinerja yang akan dinilai dari suatu keberhasilan kinerja serta realisasi penggunaan anggaran pada suatu instansi pemerintah. Penerapan anggaran berbasis kinerja diharapkan mampu mencapai tujuan anggaran yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat terhadap pengelolaan keuangan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Organisasi sektor publik menjadi salah satu objek penting sebagai harapan keberhasilan atas penerapan anggaran berbasis kinerja dalam hal pencapaian kesejahteraan masyarakat, karena dalam keberadaannya organisasi sektor publik bertujuan memaksimalkan pencapaian kesejahteraan yang dapat diwujudkan melalui pelayanan yang baik dan memuaskan kepada masyarakat. Kinerja organisasi sektor publik merupakan jantung dari keunggulan bersaing dan bagaimana organisasi sektor publik tersebut menjalankan strategi untuk beraadaptasi dengan lingkungan (Dwi, 2007). Semua itu perlu langkah strategis dan taktik yang tepat sehingga proses atau langkah yang diambil oleh pimpinan dapat dijalankan seefektif dan seefisien mungkin, terlebih pada organisasi sektor publik pada sektor pendidikan tinggi.

Dalam pelaksanaannya, sistem penganggaran di organisasi sektor publik pada sektor pendidikan tinggi di provinsi Jawa Timur, sesungguhnya telah mengadopsi dan melaksanakan penerapan anggaran berbasis kinerja (Rahmiyati,

2009). Namun pada kenyataannya masih ditemui berbagai macam permasalahan dan kendala yang sangat sulit dipecahkan, terlebih pada kapasitas keuangan ataupun anggaran pendidikan yang masih belum terarah dengan perencanaan yang maksimal. Beberapa permasalahan tersebut menjadi sebuah pertanyaan yang penuh kecurigaan, karena pada fenomena yang terjadi kapasitas keuangan ataupun anggaran dari sektor pendidikan masih dititik beratkan pada Uang Kuliah Tunggal (UKT) maupun Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) yang justru menimbulkan beban baru dan menimbulkan biaya ekonomi yang relatif tinggi sehingga memberatkan bagi mahasiswa maupun masyarakat.

Dalam arti lain, perlu dilakukan analisis mengenai kinerja keuangan organisasi sektor publik pada pendidikan tinggi di Jawa Timur apakah telah mampu mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja sehingga mampu menunjukkan klasifikasi anggaran serta peruntukannya pada program yang akan dilaksanakan sehingga kendala kapasitas keuangan tidak akan terjadi karena pengalokasian anggaran yang telah terarah sesuai pada rencana program dan mampu mencapai tujuan dasar dari adanya organisasi sektor publik yakni kesejahteraan masyarakat. Penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja merupakan hal yang paling sulit untuk diimplementasikan meskipun secara formal telah dinyatakan berlaku namun semua pihak masih mengakui bahwa penerapan prinsip tersebut masih jauh dari yang diharapkan.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, diharapkan penelitian ini mampu menjawab permasalahan yang menjadi pertanyaan atas fenomena yang terjadi di organisasi sektor publik pada sektor pendidikan tinggi di Jawa Timur. Dengan demikian, penelitian ini berjudul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik (Studi Pada Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Negeri Di Jawa Timur)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yang mengatakan:

Bagaimana pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan pada organisasi sektor publik pada lembaga pendidikan tinggi negeri vokasi di Jawa Timur ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan pada organisasi sektor publik pada lembaga pendidikan tinggi negeri vokasi di Jawa Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan peneliti khususnya tentang pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan Organisasi Sektor Publik pada Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri Vokasi Di Jawa Timur.
- b. Bagi Instansi atau Organisasi Sektor Publik pada sektor Pendidikan Tinggi Negeri Vokasi di Jawa Timur diharapkan penelitian ini dapat sebagai bahan informasi tambahan, atau masukan dan sebagai bahan pertimbangan instansi dalam penyempurnaan dan perbaikan penyusunan dalam rangka menilai kinerja keuangan.
- c. Bagi Pembaca, sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian lebih lanjut dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang konsentrasi ilmu akuntansi.